

Harian	: Radar Sulteng
Hari, tanggal	: Jumat, 30 September 2011
Keterangan	: Halaman 11 Kolom 1-7
Entitas	: Kota Palu

Orangtua Benarkan Pungutan di Sekolah

PALU – Indikasi maraknya pungutan di sekolah, yang membuat pihak Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) geram, sehingga pemerintah merasa perlu menerbitkan Peraturan Menteri guna membatasi pungutan yang dilakukan lembaga pendidikan, tampaknya juga ada di Kota Palu.

Dari hasil penelusuran kepada beberapa orangtua siswa, umumnya mereka membenarkan maraknya pungutan yang dibebankan kepada orangtua saat akan mendaftarkan anak-anaknya masuk sekolah. Saking tingginya pungutan tersebut,

membuat para orangtua berpikir bahwa biaya yang dibebankan tersebut, sudah tidak sewajarnya. Apalagi sekolah yang membebani dengan segala pungutan tersebut, adalah sekolah negeri yang notabene adalah sekolah yang mendapat subsidi rutin pemerintah, serta gurunya berstatus guru negeri yang gajinya berasal dari negara.

Ibu Sum (nama disamarkan), salah satu orangtua yang anaknya bersekolah di SMPN 4 Palu, mengaku saat akan mendaftarkan anaknya, dia harus merogoh kocek dalam-dalam. Beban pungutan yang harus dia bayarkan demi

kelangsungan pendidikan sang buah hati, Rp1,4 juta. Biaya masuk itu kata pihak sekolah, katanya biaya sumbangan untuk sekolah.

“Masuk pertama, saya bayar Rp1,4 juta kepada pihak sekolah. Tidak jelas juga untuk biaya apa, yang pasti anak saya dapat seragam olahraga dan batik,”katanya, kepada *Radar Sulteng* Kamis kemarin (29/9).

Beban pembayaran yang harus dipenuhi Ibu Sum, bukan hanya pada waktu masuk pertama sekolah. Ketika anaknya naik kelas, dia juga harus membayar sebesar Rp600 ribu. Lagi-lagi Ibu Sum mengaku mengerutkan dahinya, karena biaya itu

katanya untuk pendaftaran kembali.

“Yang pasti pas naik kelas itu, saya bayar lagi sebesar Rp 600 ribu. Yang kata pihak sekolah, uang itu untuk bayar komite selama tiga bulan dan untuk pendaftaran ulang masuk sekolah, berarti naik kelas tahun depan ini saya harus bayar berapa lagi,”keluhnya.

Dibebankan berbagai pungutan, Ibu Sum walaupun dengan berat hati, dia tetap membayar demi kelangsungan pendidikan sang buah hati. Ibu Sum, kemudian mempertanyakan alokasi dana BOS yang diterima pihak sekolah.

“Katanya sudah ada dana BOS? Lalu kenapa siswa masih dibebankan berbagai pungutan. Mau protes, juga tampaknya tidak akan mengubah situasi. Malah nanti kita dicap orang anti pendidikan. Tetapi kalau memang ada rencana pemerintah (pusat) mau terbitkan aturan untuk batasi

pungutan di sekolah, saya orang yang pertama menyatakan setuju,”kata Ibu Sum, yang kembali mewanti-wanti agar namanya disamarkan, agar anaknya tidak mendapatkan tekanan psikologi di sekolahnya.

Terpisah, Kepala SMP N 4 Kota Palu, Drs H Bakir AM Tora MH, yang dikonfirmasi Kamis kemarin (29/9), membantah pengakuan Ibu Sum. Kata Bakir, di sekolah yang dipimpinnya tidak ada pungutan sebanyak yang disebutkan oleh Ibu Sum.

“Tidak ada pungutan di SMPN 4. yang ada, orangtua siswa dan siswi yang mampu memberi sumbangan suka rela, tanpa paksaan,” kata Bakir Tora.

Menurut Bakir sapaan akrabnya, orangtua siswa yang mampu memberikan sumbangan terhadap sekolah tersebut diberikan surat pernyataan untuk ditandatangani. “Mereka menandatangani surat pernyataan

untuk menyumbang, sesuai kemampuan. Dan sumbangan itu berlaku 3 tahun dan menyicilnya sesuai kemampuan melalui komite yang ada. Jadi tidak ada pungutan yang tidak jelas. Untuk orang tua siswa yang mengatakan itu jangan sampai memfitnah sekolah,”jelasnya.

Sementara itu, Indah orangtua siswa salah satu SDN di Palu Barat, mengatakan kalau pihak sekolah anaknya, sering membebani dirinya selaku orangtua dengan pembayaran, untuk kegiatan yang semestinya adalah kegiatan sekolah.

“Baru-baru ini saja, kegiatan tari pamonte yang dilaksanakan dilapangan Walikota Palu, orangtua harus rela keluarkan duit. Dari seragam hingga makan, semua kami sekeluarga yang tanggung. Padahal itu kegiatan sekolah, kenapa mesti kami yang tanggung,” keluhnya.

Seperti dilansir media ini edisi Kamis kemarin, bahwa

berdasarkan hasil survei 2011 oleh BPKP, Itjen Kemendagri dan Itjen Kemendiknas pada 1.289 sekolah, dengan rincian 675 SD, 414 SMP, dan 133 SMA. Untuk jenjang SD, pungutan terbesar untuk seragam mencapai 46,7 persen. Kemudian, pungutan untuk LKS 14,2 persen. Sedangkan SMP tidak jauh berbeda. Seragam, LKS dan gedung menjadi terbesar. Seragam 49 persen. LKS 9,7 persen, dan gedung 9,2 persen.

Untuk SMA, pungli seragam 51,9 persen, gedung 30,1 persen, MOS 26,3 persen, administrasi pendaftaran 24,8 persen, buku atau LKS 12,8 persen, laboratorium 6 persen dan uang ujian 0,8 persen. Sementara di SMK seragam 67,2 persen, gedung 34,3 persen, MOS 31,3 persen, administrasi pendaftaran 34,3 persen, buku atau LKS 9 persen, ekstrakurikuler 14,9 persen, dan laboratorium 6 persen. (cr2)